

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akibat pertambahan penduduk yang sangat cepat, lahan pertanian penduduk pedesaan di pulau Jawa makin lama makin sempit. "Data menunjukkan bahwa di pulau Jawa terdapat 72,69 % rumah tangga yang mengusahakan tanah pertanian kurang dari 0,5 Ha" (BPS, 1982 : 32). Padahal kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pangan, kian lama kian meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Karena lahan kian hari kian relatif sempit serta terdesak oleh kebutuhan sehari-hari, para petani terpaksa mencari lahan lain yang sekiranya dapat digunakan untuk menunjang kehidupannya tanpa sempat memperhatikan cocok tidaknya lahan tersebut untuk dijadikan lahan pertanian .Misalnya menggarap lahan yang sangat miring. Padahal, "... lahan yang terletak di lereng-lereng terjal di daerah pegunungan 'tidak dapat digunakan ' untuk keperluan-keperluan yang menyebabkan rusaknya sistem tata air yang akan merusak penggunaan air tanah di lembah-lembah" (Moch. Soerjani,dkk, 1987 : 49). Di samping itu, banyak pula diantaranya yang menambah

penghasilan dengan menebang kayu di hutan-hutan lindung secara membabi buta. Kayu tersebut dijual kepada mereka yang membutuhkan untuk digunakan sebagai bahan bangunan, perabot rumah tangga, bahan bakar pembuatan genting, atau bahkan kayu bakar.

Sekilas nampak bahwa keadaan ini semua disebabkan oleh rendahnya kesadaran mereka terhadap keseimbangan lingkungan. Namun apabila ditelaah lebih jauh nampak bahwa keadaan ini erat kaitannya dengan faktor kemiskinan, karena keadaan yang serba miskin menyebabkan mereka tidak lagi memikirkan 'nanti bagaimana' bila lingkungan ini menjadi rusak, namun lebih cenderung bersikap 'bagaimana nanti' saja, sebab yang penting mereka dapat mempertahankan hidupnya sehari-hari.

Masalah kemiskinan oleh Astrid S.Susanto dipandang sebagai masalah utama (1984:83), oleh Kartini Kartono dipandang sebagai masalah kritis gawat (1986:3), oleh Soepardjo Adikusumo dipandang sebagai masalah fundamental (1988:71), sehingga layaklah bila Thee Kian Wie (1983:18) memandangnya sebagai masalah nasional yang besar.

Menurut Soedjatmoko (1984:157) kemiskinan bisa berbentuk relatif maupun absolut. Kemiskinan relatif merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat penda-

patan seseorang relatif tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya. Kemiskinan absolut menunjukkan tingkat pendapatan mutlak seseorang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya (Kindervatter, 1979:1 ; Arndt, 1983:57). Besarnya dimensi masalah kemiskinan absolut ini tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan dan konsumsinya berada di bawah "garis kemiskinan" (tingkat hidup minimal). Walaupun golongan petani kaya atau sebagian dari petani sedang telah dapat ditingkatkan pendapatannya, namun bagian terbesar dari petani Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan (Dawam Rahardjo, 1984:278 ; Siagian, 1984 : 129). Soedjatmoko membagi para petani ini menjadi tiga golongan. Golongan pertama ialah golongan yang memiliki tanah cukup besar untuk menjamin kehidupan yang cukup bagi keluarganya. Golongan kedua terdiri dari petani-petani yang memiliki atau menguasai tanah yang luasnya atau kualitasnya marginal, sehingga kehidupannya dan keluarganya sangat tergantung selain dari kesempatan kerja sampingan, juga dari iklim dan faktor harga. Kalau ada hama wereng, banjir atau musim kemarau yang panjang, tingkat kehidupan mereka langsung terpukul. Golongan ketiga ialah mereka yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Seluruh kehidupannya tergantung dari upah sebagai penggarap tanah dan dari upah keluarga

nya yang mengerjakan berbagai macam pekerjaan tambahan yang sangat rendah produktivitasnya tapi yang memerlukan ia dan keluarganya bekerja sepanjang hari secara terus menerus (Alfian, dkk., 1980 : 51-53). Perbedaan ketiga lapisan ini cukup besar. Perbedaan itu tampak bukan saja pada tingkat dan kemantapan penghasilannya, tapi juga pada status gizi dan status kesehatannya, khususnya untuk para wanita dan anak-anak. Begitu pula di dalam pola asuhan anak. Anak-anak yang sekolah dari golongan ketiga paling kecil persentasenya, sedangkan persentase mereka yang putus sekolah paling tinggi. Ketergantungannya pada fluktuasi harga dan pasaran kerja hampir total sifatnya. Kalau harga pangan naik, mereka tidak bisa menunda pembeliannya. Kalau upah menurun di masa paceklik atau karena sebab-sebab lain, mereka tidak bisa menolaknya. Mereka juga tidak bisa mengambil risiko suatu apapun, dan hanya dapat memanfaatkan peluang-peluang baru atau sarana pelayanan sosial baru jikalau hal itu tidak mengurangi persyaratan untuk kepastian hidupnya. Anak-anak mempunyai peranan ekonomis penting untuk orang tuanya. Diperhitungkan bahwa sesudah umur 13 atau 14 tahun, dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya si anak mulai membayar kembali investasi orang tuanya dalam pengasuhan anaknya. Hal ini merupakan dorongan kuat untuk mempunyai anak banyak karena anak

merupakan sumber tenaga kerja, biarpun sebaliknya angka kematian anak di golongan ini barangkali paling tinggi. Hal ini menyebabkan, "... jumlah penduduk di desa cenderung meningkat lebih cepat dari di kota. Gejala ini didukung oleh kenyataan bahwa tingkat pendidikan kebanyakan penduduk desa adalah rendah" (Soepardjo Adikusumo, 1989 : 41). Dalam hal ini mereka umumnya tidak mempunyai suara, tidak mempunyai kekuatan untuk memperjuangkan penyesuaian ketimpangan-ketimpangan yang terlalu besar, bahkan sering tidak kelihatan, kecuali kalau sungguh-sungguh diteliti dicari, dan mereka umumnya tidak turut dalam kehidupan nasional. Mereka tidak terorganisasi, dan boleh dikatakan hidup sendiri-sendiri dalam keluarganya masing-masing dan dalam usahanya untuk menyambung hidupnya sendiri.

Kemiskinan yang menyebabkan mereka kurang mengindahkan masalah pendidikan bagi anak-anaknya maupun bagi dirinya mengakibatkan pula tingkat pengetahuan mereka relatif rendah. Pengetahuan yang rendah menyebabkan pula kurangnya wawasan mereka untuk menggali dan memanfaatkan potensi dirinya maupun potensi yang ada di sekelilingnya untuk meningkatkan kondisi kehidupannya ke arah yang lebih baik. Keadaan ini nampaknya merupakan suatu lingkaran, karena kemiskinan menyebabkan kebodohan, selan-

lutnya kebodohan menyebabkan mereka tidak atau kurang dapat menggali potensi yang dapat dimanfaatkan untuk merubah kondisi kehidupannya. Akibatnya mereka tetap miskin dan bahkan mewariskan kemiskinan ini pada generasi berikutnya. Hal ini erat pula kaitannya dengan rendahnya kesadaran mereka terhadap lingkungannya. Mereka tidak atau kurang memanfaatkan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Akibatnya lingkungan menjadi rusak dan bahkan menjadi ancaman bagi kehidupan mereka sendiri yang tentunya akan menambah berat beban kemiskinan yang sudah mereka tanggung selama ini.

Sebagai ilustrasi dari keadaan tersebut dapat dikemukakan bahwa : "... pada tahun 1980 kurang lebih 30 % penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan 37 % relatif bergizi rendah" (Laporan Bank Dunia, 1982). Sedangkan menurut Biro Pusat Statistik diketahui bahwa : "... pada tahun 1976 terdapat sebesar 71,7 % penduduk pedesaan Jawa ... masih hidup di bawah garis kemiskinan. Khususnya untuk penduduk golongan petani, diketahui sebesar 80,4 % di pedesaan Jawa masih hidup di bawah garis kemiskinan" (Sunarto Ndatu Mursito, 1982 : 1051).

Selanjutnya, menurut sensus tahun 1980, kurang lebih 28 % penduduk Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas masih buta huruf latin dan kurang lebih 85 % dari

jumlah penduduk Indonesia tidak/belum tamat SD dan Tamat SD (BPS, 1982 : 16-22). Sebagian dari mereka hidup di daerah pedesaan.

Sartono Kartodirdjo (1979 : 5) menyatakan bahwa syndrome kemiskinan di pedesaan mempunyai kompleks dimensi-dimensi yang saling berkaitan dan saling memperkuat : produktivitas rendah, pengangguran, tuna tanah, kurang gizi, morbiditas tinggi, buta huruf dan lain sebagainya. Selanjutnya dikatakan pula bahwa disamping syndrome kemiskinan terdapat pula syndrome inertia yang berakar pada passivisme, fatalisme, terarah ke dalam, serba patuh, ketergantungan dan sebagainya. Kedua syndrome ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah pedesaan, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, struktur sosial yang sering masih bersifat feodal, sikap dan sistem kepercayaan yang masih bersifat tradisional.

Ismawan (1984 : 6) lebih jauh lagi mengatakan bahwa : "... masalah pedesaan di Indonesia, terutama di Jawa ... adalah kemiskinan dan keterbelakangan. Gambaran nyata kemiskinan dan keterbelakangan adalah ... pendapatan mayoritas penduduk pedesaan yang rendah".

Jelaslah bahwa rendahnya pendapatan penduduk dalam keadaan kurang terbukanya kesempatan kerja yang

lebih baik dan tingkat pendidikan yang masih rendah, telah turut mendorong penduduk negara berkembang menguras sumber alam bagi keperluan hidupnya. Sehingga: "... bagi negara berkembang inti permasalahannya menjadi bagaimana mengusahakan agar pembangunan dapat menanggulangi kemiskinan yang ada, tetapi menurut cara dan jalan pembangunan yang mengindahkan pengembangan lingkungan (Moch.Soerjani, dkk, 1987 : 154).

Untuk mempertahankan lingkungan hidup yang baik seharusnya tidak hanya mempertahankan unsur fisik seperti tanah, air, dan udara, karena penyebab ketimpangan hidup adalah manusia. Maka manusia itu pulalah yang bertanggung jawab memelihara dan melestarikan lingkungan hidupnya. Menurut Soedjiran Resosoedarmo, dkk.(1985 : 145) hal ini disebabkan karena kelakuan dan tingkat kebudayaan manusia sangat ikut menentukan bentuk dan intensitas interaksi antara manusia dan alam lingkungannya. Sementara itu di dalam kesatuan ekosistem, kedudukan manusia adalah sebagai bagian dari unsur-unsur lain yang tak mungkin terpisahkan. Karena itu seperti halnya organisme lainnya, kelangsungan hidup manusia tergantung pula pada kelestarian ekosistemnya.

Pelestarian lingkungan hidup menurut Moestadji (1983 : 13) dapat diartikan sebagai : "... upaya guna tercapainya kehidupan yang optimal". Dalam hal ini, "...

perlu ditingkatkan upaya keserasian penduduk dengan lingkungan hidupnya, dikembangkan kesadaran lingkungannya, serta didorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam melestarikan kemampuan lingkungan hidup" (Deppen RI, 1988 : 176). Untuk keperluan ini, "... perlu ditingkatkan kegiatan penyuluhan, percontohan dan sebagainya" (Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPR, 1983 : 94).

Berhasilnya program-program di bidang pelestarian kemampuan lingkungan, banyak tergantung kepada peran serta masyarakat itu sendiri. Dalam Undang-Undang No.4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, lebih jauh dikemukakan bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kaitan ini lembaga swadaya masyarakat tumbuh berperan sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup dan berkembang mendaya gunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikut sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian tujuan pengelolaan lingkungan hidup ingin dicapai dengan ikhtiar kita semua, didorong oleh kesadaran diri kita masing-masing untuk mengembangkan lingkungan hidup. (Moch.Soerjani, dkk., 1987 : 169).

Melalui kegiatan penyuluhan, percontohan dan lain

sebagainya, diharapkan dapat terjadi perubahan sikap dan perilaku masyarakat, "... dari kurang tahu menjadi tahu, dari kurang terampil menjadi terampil, dari sikap mental 'nrimo' menjadi sikap yang lebih bertanggung jawab" (W.P.Napitupulu, 1979 : 29). Jenis pendidikan yang cocok dengan kondisi warga masyarakat pedesaan adalah pendidikan luar sekolah, yang model penyelenggaraannya antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk penyuluhan.

Usaha pendidikan tadi sudah barang tentu memerlukan berbagai unsur penunjang, baik berupa pesan, saluran komunikasi, prasarana, metoda penyampaian, penyuluh lapangan selaku agen perubahan dan terutama warga masyarakat itu sendiri sebagai kelompok sasaran. Dalam hal ini perlu pula ditingkatkan komunikasi dua arah secara timbal balik dan intensif, seperti pernah dinyatakan dalam SK Menteri Penerangan RI No.110/Kep/Menpen/1984, yaitu bahwa dalam usaha memperluas dan mengintensifkan interaksi yang positif dalam proses komunikasi dua arah, selama ini telah berhasil dikembangkan sistem komunikasi pembangunan pedesaan, yaitu 'Siaran Pedesaan'. Hingga akhir Pelita III terdaftar tidak kurang dari 41.117 Kelompok Pendengar sebagai lembaga partisipasi masyarakat, pendidikan non formal dan basis penerangan pembangunan serta jalur komunikasi timbal balik. Dari hasil penelitian Balitbang Penerangan dapat ditarik kesimpulan

bahwa Siaran Pedesaan sangat bermanfaat sebagai wahana informasi di kawasan pedesaan. Siaran pedesaan itu sendiri merupakan sistem komunikasi sosial yang terpadu melalui multi media dalam usaha meningkatkan keagairahan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat di daerah pedesaan untuk berperan aktif sebagai penggerak pembangunan di segala bidang dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat lingkungannya.

Melihat manfaat Siaran Pedesaan tersebut serta menghadapi tugas-tugas yang semakin berat dalam Pelita-Pelita berikutnya, maka perlu kiranya memperluas dan mengintensifkan Siaran Pedesaan agar dapat menjangkau seluruh pelosok pedesaan, yang dilakukan melalui media cetak, media radio, media TV atau media lainnya (multi media). Dengan demikian maka selain Kelompok Pendengar nampaknya diharapkan pula Kelompok Pembaca dan Kelompok Pemirsa sebagai lembaga partisipasi masyarakat, basis penerangan pembangunan, serta jalur komunikasi timbal balik yang terpadu. Alasan inilah yang dijadikan dasar tumbuhnya Kelompok Pendengar, Kelompok Pembaca dan Kelompok Pemirsa yang lebih dikenal dengan singkatan KELOMPENCAPIR.

Kelompencapir ialah organisasi sosial yang tumbuh dari bawah atas kesadaran dan kesepakatan bersama di

lingkungan desa/kelurahan sebagai lembaga partisipasi masyarakat dalam pembangunan, untuk menyerap, mengkaji, memberikan umpan balik dan menyebar luaskan pesan, program dan kebijaksanaan penerangan pembangunan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.

Dalam Pedoman Pembinaan Siaran Pedesaan dinyatakan bahwa sasaran pembinaan siaran pedesaan berupaya untuk menempatkan Kelompencapir sebagai tenaga-tenaga penggerak penerangan pembangunan di kawasan pedesaan yang terkoordinasi melalui LKMD. Oleh karena itu kegiatannya diharapkan dapat membantu menyebar luaskan informasi pembangunan. Dalam hal ini kegiatan Kelompencapir tidak terbatas pada kegiatan 'mendengarkan-membaca-melihat', akan tetapi juga dapat mengangkat permasalahan masyarakat di sekitarnya untuk didiskusikan di lingkungan kelompoknya. Dengan demikian Kelompencapir juga dalam hal-hal tertentu dapat bertindak sebagai penyalur aspirasi, keinginan dan harapan anggota masyarakat kepada pemerintah.

Di antara sekian banyak Kelompencapir yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya terletak di Desa Palasari, Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung, yang diberi nama Kelompencapir Palasari. Sesuai dengan fungsinya, Kelompencapir Palasari ini berupaya untuk menjadi tenaga penggerak pembangunan di lingkungannya, terutama

yang berkaitan dengan masalah penghijauan lahan kritis. Dalam hal ini Kelompencapir Palasari berusaha untuk menyebar luaskan informasi tentang penghijauan lahan kritis, membimbing dan membina pelaksanaannya kepada masyarakat di lingkungannya, terutama masyarakat kampung Garung yang terletak di desa Cilengkrang, Kecamatan Ujungberung, Kabupaten Bandung, dengan tujuan agar mereka memiliki kesadaran tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan dan bahkan melaksanakan pemeliharaan lingkungan demi kebaikan kehidupan mereka sendiri. Selama ini lingkungan tersebut mengalami kerusakan akibat ulah mereka sendiri tanpa memikirkan akibatnya.

Banyak hambatan yang dialami Kelompencapir dalam membimbing warga masyarakat ke arah pembentukan sikap dan perilaku yang diharapkan. Oleh karena itu setiap informasi yang disampaikan selalu diikuti dengan tindakan berikutnya seperti membimbing pelaksanaan penghijauan serta pemantauan dan serangkaian pembinaan lainnya. Pada awalnya sulit sekali mereka menyadari pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup karena selama ini mereka kurang atau bahkan tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, sehingga bagi mereka hal tersebut merupakan inovasi. Namun setelah sekian lama, akhirnya mereka dapat menyadari pentingnya pelaksanaan penghi-

jauan lahan kritis dan bahkan melaksanakan penghijauan tersebut.

Setelah beberapa tahun warga masyarakat melaksanakan penghijauan nampak ada perbedaan sikap dan perilaku antara warga yang satu dengan warga yang lainnya tentang kelanjutan pelaksanaan program penghijauan. Kelihatannya terdapat beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku masyarakat tersebut hingga pembinaan rutin saja bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan program penghijauan.

Keadaan ini sangat menarik untuk diteliti, apalagi bila melihat keadaan pohon-pohon penghijauan yang sebenarnya mempunyai nilai ekonomis tinggi di pasar-pasar kota Bandung, seperti jambu, adpokat, nangka, rambutan dan lain-lain. Di samping itu juga mereka masih tetap dianjurkan untuk menanam tanaman musiman/tumpang sari yang selama ini biasa mereka tanam, seperti singkong, jagung, kacang panjang, tomat dan lain-lain. Bahkan lebih jauh lagi, Kelompencapir memberikan bimbingan tentang penanaman tanaman tumpang sari yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dari tanaman yang sudah ada, seperti cabai merah, bawang merah, serta tembakau. Pengisian lahan kritis dengan kedua jenis kelompok tanaman ini (tanaman keras dan tanaman tumpang sari/musiman) diharapkan dapat memberikan penghasilan

tambahan yang lebih berarti daripada penghasilan sebelumnya.

B. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya nampak bahwa secara makro penelitian ini bertitik tolak pada upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat serta mendorong swadaya masyarakat agar turut berpartisipasi dalam memelihara lingkungan alam yang menjadi sumber kehidupannya. Hal ini penting mengingat sumber kehidupan ini pada dasarnya merupakan sumber kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kesejahteraan itu sendiri merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program pembangunan.

Namun ternyata kondisi masyarakat tidak selalu memungkinkan upaya pemerintah itu berjalan mulus. Banyak faktor yang mempengaruhi kesadaran serta partisipasi mereka dalam pembangunan, sehingga timbul adanya perbedaan hasil yang dicapai. Hal ini mengundang berbagai sektor untuk menanganinya, terutama sekali sektor pendidikan yang justru memiliki tugas untuk menyiapkan manusia-manusia pembangunan.

Secara mikro, penelitian ini memusatkan perhatian di sekitar keputusan warga masyarakat terhadap kelanjutan penghijauan lahan kritis setelah sekian lama mereka

menerima dan melaksanakan program tersebut.

Secara teoritis maupun secara empiris nampak bahwa keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi ini menunjukkan bentuk yang berbeda satu sama lain. Itulah inti permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Dengan demikian masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : " Mengapa pada tahap konfirmasi terjadi perbedaan keputusan tentang kelanjutan program penghijauan lahan kritis di antara warga masyarakat peserta program penghijauan padahal pada waktu sebelumnya mereka telah mengadopsi program tersebut "

Banyak faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya keadaan seperti itu. Misalnya faktor dari dalam warga masyarakat itu sendiri (internal), seperti umur, latar belakang pendidikan, status sosial ekonomi, sikap terhadap perubahan, motif berprestasi. Kemudian ada juga faktor yang berasal dari luar (eksternal), seperti nilai budaya, kondisi alam, kebijakan pemerintah, media komunikasi, dan lain-lain. Namun karena adanya berbagai keterbatasan, maka dalam penelitian ini hanya akan dipilih beberapa faktor saja yang diduga mempunyai pengaruh kuat terhadap masalah yang diteliti, yakni faktor status sosial ekonomi, tradisi keluarga, keterbukaan berkomunikasi serta keuntungan relatif.

Alasan faktor-faktor tersebut dipilih sebagai variabel penelitian semata-mata karena diduga mampu menjelaskan masalah yang diteliti, bukan berarti mampu memberikan penjelasan secara menyeluruh. Dugaan ini didasarkan pada kenyataan yang sangat menonjol dalam masyarakat itu sendiri yang menunjukkan bahwa pada umumnya mereka hidup serba kekurangan sehingga wajarlah bila mereka mendambakan keuntungan materi yang akan dapat mengubah nasibnya; setiap gerak langkahnya selalu di dasarkan pada tradisi keluarga, lokasi kampung yang agak terisolir menyebabkan hubungan dengan dunia luar juga agak terisolir. Di samping itu dugaan ini juga didasarkan pada beberapa pendapat diantaranya pendapat Ath-Thawil (1987:73) yang menyatakan bahwa pendapatan bagian terbesar petani di pedesaan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya membuat mereka menjadi golongan yang kekurangan uang sehingga terperangkap dalam kondisi hidup yang serba kurang. Mereka masih diliputi kekurangan dalam bidang sandang, papan, pendidikan, kesehatan, angkutan, komunikasi, kesejahteraan sosial, harga diri, kualitas kerja, modal, luas tanah, sumber alam, keterampilan, kondisi jasmaniah, kondisi rohaniah, dan lingkungan yang memungkinkan perubahan dan kemajuan (Emil Salim, 1980:76; Sanapiah Faisal, 1981:4). Kondisi kehidupan mereka seperti ini telah

membuat mereka "hidup bersama" dengan ketuna-aksaraan, penyakit (UNESCO, 1978:89) dan kebodohan (Napitupulu, 1980:8). Mereka bodoh karena mereka hidup serba kurang. Mereka hidup serba kurang karena mereka miskin. Mereka miskin karena mereka bodoh. Kemiskinan, kebodohan dan kehidupan yang serba kekurangan merupakan lingkaran derita yang mencekam bagian terbesar dari kaum tani di pedesaan.

Kondisi seperti ini jelas akan berpengaruh terhadap motivasi mereka untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena mereka hanya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan saat ini. Hal ini didasarkan pada pendapat Maslow tentang urutan kebutuhan manusia yang digambarkan sebagai berikut : (1) kebutuhan fisik; (2) kebutuhan rasa aman; (3) kebutuhan sosial; (4) kebutuhan penghargaan; dan (5) kebutuhan aktualisasi diri (Krech et al, 1982:76). Perilaku seseorang akan dimotivasi oleh kebutuhan-kebutuhannya. Perilaku seseorang akan diarahkan pada pemuasan kebutuhan-kebutuhannya yang "lebih rendah" dulu sebelum muncul kebutuhan-kebutuhannya yang "lebih tinggi". Kebutuhan yang dirasakan paling kuat oleh seseorang pada suatu saat akan memotivasi perilakunya untuk memenuhinya. Tetapi jika kebutuhannya yang paling

kuat ini sudah terpenuhinya, maka kebutuhan itu melemah daya desaknya terhadap perilakunya. Kebutuhan yang kuat bagi seseorang menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut mempunyai kedudukan yang dominan dalam struktur kebutuhannya (Hersey dan Blanchard, 1982:28).

Bila dikaitkan dengan kondisi warga masyarakat di kampung Garung nampak bahwa kebutuhan yang mempunyai daya desak yang tinggi bagi mereka saat ini adalah pemenuhan kebutuhan fisik yaitu terutama sandang, pangan dan papan. Penghijauan lahan kritis nampaknya kurang menunjukkan upaya untuk memenuhi kebutuhan fisik tersebut pada saat sekarang ini, akan tetapi masih dianggap sebagai upaya yang bersifat antisipatif. Oleh karena itu faktor-faktor yang dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi motivasi mereka untuk mengkonfirmasi kelanjutan penghijauan lahan kritis.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka untuk lebih mempertegas masalah yang akan diteliti, perlu kiranya permasalahan dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap kelanjutan program penghijauan lahan kritis ?

2. Apakah perbedaan status sosial ekonomi mempengaruhi keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap kelanjutan program penghijauan lahan kritis ?
3. Apakah perbedaan tradisi keluarga mempengaruhi keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap kelanjutan program penghijauan lahan kritis ?
4. Apakah perbedaan keterbukaan berkomunikasi mempengaruhi keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap kelanjutan program penghijauan lahan kritis ?
5. Apakah keuntungan relatif mempengaruhi keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap kelanjutan program penghijauan lahan kritis ?

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan atau menjawab masalah-masalah tersebut. Adapun pertautan antara faktor keputusan warga masyarakat yang terjadi pada tahap konfirmasi terhadap kelanjutan program penghijauan lahan kritis dengan faktor-faktor lainnya yang diduga mempengaruhi keputusan tersebut, akan diuraikan berikut ini.

C. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL

1. Keputusan Warga Masyarakat Pada Tahap Konfirmasi terhadap Kelanjutan Program Penghijauan Lahan Kritis

Menurut Everett M. Rogers (1983 : 165), tahap konfirmasi merupakan salah satu tahap dalam proses keputusan inovasi yang seluruhnya terdiri : knowledge (pengenalan), persuasion (persuasi) decision (keputusan), implementation (pelaksanaan) dan confirmation (konfirmasi atau pengukuhan/penegasan). Tahap konfirmasi ini berlangsung setelah ada keputusan untuk menerima atau menolak inovasi selama jangka waktu yang tidak terbatas.

Dalam tahap ini seseorang atau kelompok memperkuat atau mempertegas sikap dan perilakunya untuk tetap mendukung dan menggunakan inovasi tersebut dalam praktek kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan, atau sebaliknya seseorang atau kelompok yang sebelumnya telah mengadopsi, merubah keputusannya jika ia atau kelompok itu memperoleh informasi atau peristiwa yang bertentangan dengan apa yang selama ini diterimanya.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program penghijauan di kampung Garung, nampak bahwa program penghijauan itu merupakan sesuatu hal yang baru bagi

mereka, karena mereka selama ini hanya mengenal tanaman yang bersifat musiman. Sementara tanaman keras yang digunakan dalam program penghijauan dianggapnya tidak usah ditanam dan dipelihara baik-baik seperti halnya dengan tanaman tumpang sari. Padahal dalam program penghijauan, tanaman keras sengaja ditanam dan dipelihara baik-baik seperti halnya tanaman tumpang sari.

Karena mereka tidak terbiasa menanam tanaman keras, maka pada awal program penghijauan banyak yang menolak melaksanakan program tersebut. Berkat keuletan para anggota Kelompencapir akhirnya mereka mau juga menerima program penghijauan tersebut. Namun setelah sekian lama program itu berlangsung nampak bahwa penerimaan warga masyarakat terhadap program ini tidak sama. Ada diantara mereka yang berusaha memelihara sebaik mungkin bahkan kemudian mencari dan mengembangkan tanaman keras lainnya yang tidak termasuk dalam daftar penghijauan yang dianjurkan Kelompencapir. Namun nampak ada pula yang memelihara tanaman penghijauannya secara asal-asalan dan bahkan ada yang tidak memeliharanya lagi sama sekali.

Dari kenyataan tersebut nampak bahwa keputusan untuk menerima program penghijauan itu tidak berakhir pada saat mereka mau menanam lahan kritisnya dengan tanaman keras, namun masih ada lagi kemungkinan muncul-

nya sikap lain terhadap program tersebut, karena adanya berbagai faktor yang berasal dari individu itu sendiri maupun dari luar dirinya yang dapat mempengaruhi penerimaan program tersebut.

Sejauh mana perbedaan keputusan warga masyarakat terhadap kelanjutan program penghijauan lahan kritis, dalam penelitian ini akan dilihat hubungannya dengan status sosial ekonomi, tradisi keluarga, keterbukaan berkomunikasi dan keuntungan relatif yang diperoleh warga masyarakat. Berdasarkan hal ini maka keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi berkedudukan sebagai variabel dependen.

Guna memudahkan pengukurannya, maka keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi ini perlu lebih dulu disusun rumusan operasionalnya. Dalam hal ini terdapat lima aspek yang akan digunakan untuk meneliti variabel tersebut, yaitu : a) jenis tanaman yang ditanam pada lahan kritis, b) jarak tanam dan jumlah tanaman yang terdapat pada lahan kritis, c) pemupukan, d) penyiraman air, e) pencegahan/pengobatan hama.

Berdasarkan kelima aspek tersebut maka dapat disusun rumusan keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi dalam penelitian ini sebagai berikut : "Suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat

kampung Garung yang berkenaan dengan program penghijauan lahan kritis garapannya, yang meliputi : jenis tanaman yang ditanam pada lahan kritis, jarak tanam serta jumlah tanaman penghijauan yang terdapat pada lahan kritis, upaya pemupukan dan penyiraman air serta upaya pencegahan dan pengobatan hama tanaman".

Berdasarkan rumusan operasional tersebut maka pengukuran keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi akan dilihat dari kelima aspek tersebut. Kelima aspek ini juga sekaligus merupakan sub variabel dependen yang akan dilihat hubungannya dengan status sosial ekonomi, tradisi keluarga, keterbukaan berkomunikasi dan keuntungan relatif yang diperoleh warga masyarakat.

2. Status Sosial Ekonomi

Setiap masyarakat selalu memiliki struktur yang terdiri dari strata atau pelapisan-pelapisan sosial. Salah satu cara untuk melihat posisi seseorang di dalam pelapisan sosial tadi yaitu dengan melihat status sosial ekonominya. Posisi sosial ini menentukan dalam kelas mana ia berada. Soerjono Soekanto (1990 : 262) mengatakan bahwa kelas memberikan fasilitas-fasilitas hidup yang tertentu (life chances) bagi anggotanya. Misalnya, keselamatan atas hidup dan harta benda, kebebasan, standar hidup yang tinggi dan sebagainya, yang dalam

arti-arti tertentu tidak dipunyai oleh para warga kelas-kelas lainnya. Kecuali itu kelas juga mempengaruhi gaya dan tingkah laku hidup masing-masing warganya (life style). Selanjutnya dikatakan pula bahwa kedudukan dan peranan yang dianggap tertinggi oleh setiap masyarakat adalah kedudukan dan peranan yang dianggap terpenting serta memerlukan kemampuan dan latihan-latihan yang maksimal.

Dari pendapat-pendapat tersebut nampak bahwa perbedaan kelas itu dapat mempengaruhi kesempatan seseorang atau masyarakat untuk melakukan tindakan. Mereka yang berada pada kelas sosial bawah memiliki kondisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan mereka yang berada pada kelas sosial yang lebih tinggi. Status sosial ekonomi juga cenderung menentukan cepat lambatnya seseorang menerima informasi. Rogers (1983 : 93) mengemukakan bahwa golongan yang status sosial ekonominya tinggi cenderung cepat menerima informasi, sehingga mempunyai motivasi untuk berpartisipasi lebih tinggi daripada golongan yang status sosial ekonominya rendah.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, berarti warga masyarakat yang memiliki status sosial ekonomi tinggi cenderung berpartisipasi lebih tinggi terhadap program penghijauan daripada warga masyarakat yang

status sosial ekonominya rendah.

Untuk menentukan status sosial ekonomi seseorang dalam penelitian ini dilihat dari aspek-aspek: pendidikan, kedudukan dalam masyarakat, sumber pendapatan, jumlah pendapatan dan kekayaan yang dimiliki.

3. Tradisi Keluarga

Tradisi menurut Soejono Soekanto (1983 : 381) merupakan "... adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dipelihara". Menurut A.Mukti Ali (1987 : 203) "... yang menjadi sumber utama nilai budaya masyarakat adalah agama dan adat (tradisi), disamping ideologi modern., ekonomi, atau aspek sosial budaya lainnya. Lebih jauh lagi Koentjaraningrat (1987 : 25) mengemukakan pula bahwa para individu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsepsi-konsepsi itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu relatif singkat.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut nampak bahwa tradisi sebagai sumber utama nilai budaya masyarakat, merupakan sumber yang mengarahkan dan mengendalikan aktivitas manusia. Hal ini cenderung menunjukkan bahwa tradisi masyarakat dapat mempengaruhi cepat lambatnya

seseorang atau masyarakat untuk menerima informasi-informasi baru. Oleh karena itu dalam penelitian ini diperkirakan tradisi masyarakat akan ikut mempengaruhi keputusan untuk menerima atau menolak hal-hal yang baru. Pengukurannya dilakukan dengan melihat tempat asal warga masyarakat itu sendiri, tradisi yang berkaitan dengan upacara adat, dan pantangan-pantangan pada saat mengolah tanah pertanian.

4. Keterbukaan Berkomunikasi

Keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi erat kaitannya dengan proses pengoperan dan penerimaan dari lambang-lambang yang mengandung arti. Menurut Skinner (Astrid Susanto, 1977 : 41), "Komunikasi akan berlangsung selama orang mempunyai apa yang disebut 'expectation of reward' ataupun adanya harapan untuk memperoleh suatu keuntungan dari pelaksanaan komunikasi. Keuntungan ataupun manfaat yang diharapkan bisa merupakan pemenuhan kebutuhan orang dalam bentuk kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan sosial". Dengan demikian maka kegiatan komunikasi merupakan alat untuk mencapai tujuan, apakah tujuan itu merupakan tujuan yang hanya untuk "menghabiskan waktu" ataupun untuk mengerjakan sesuatu yang sungguh-sungguh penting.

Mengingat sedemikian banyak orang di masyarakat yang menawarkan idenya, maka komunikasi akan dihadapkan pada proses pengambilan keputusan ,artinya memilih diantara lebih dari satu kemungkinan . Namun menurut Astrid Susanto (1977 : 72), "... setiap alternatif sebelum pengambilan keputusan akan diteropong dahulu oleh komunikan dan dibandingkan dengan tujuan/harapannya sendiri". Selanjutnya dikatakan bahwa orang akan memilih alternatif yang paling menguntungkan atau yang nampaknya diharapkan akan lebih menguntungkan.

Dari uraian tersebut nampak bahwa terbuka atau tidak terbukanya seseorang terhadap informasi, akan tergantung pada sesuai tidaknya informasi itu dengan harapan atau kebutuhan penerima informasi. Dalam penelitian ini diperkirakan keterbukaan berkomunikasi dapat mempengaruhi keputusan untuk menerima atau menolak hal-hal yang baru.

5. Keuntungan Relatif

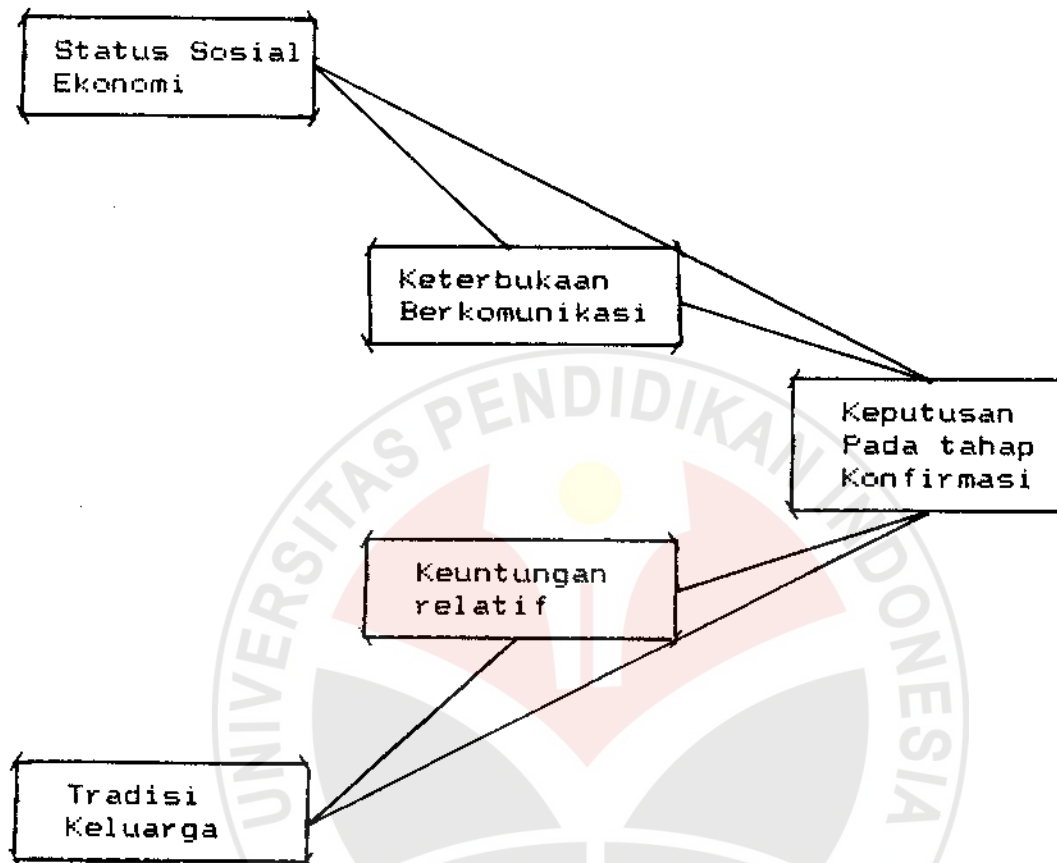
Menurut Everett M.Rogers keuntungan relatif adalah :

... suatu tingkatan di mana suatu ide baru dianggap suatu yang lebih baik daripada ide-ide sebelumnya. Tingkat keuntungan relatif sering dinyatakan dengan atau dalam bentuk keuntungan ekonomis. Tetapi dimensi keuntungan relatif bisa juga diukur dengan cara lain. Dalam suatu segi , keuntungan relatif menunjukkan intensitas imbalan atau hukuman yang ditimbulkan oleh pengadopsian suatu inovasi.

Ada beberapa sub dimensi keuntungan relatif, yaitu : tingkat keuntungan ekonomis, rendahnya biaya permulaan, risiko nyata lebih rendah, kurangnya ketidaknyamanan, hemat tenaga dan waktu,serta imbalan yang segera dapat diperoleh. Dengan demikian dalam penelitian ini diperkirakan keuntungan relatif dapat mempengaruhi penerimaan atau penolakan program penghijauan lahan kritis bila diingat bahwa program penghijauan lahan kritis merupakan suatu hal yang baru bagi warga masyarakat tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tentang variabel-variabel penelitian ini, maka dapatlah dikemukakan bahwa variabel status sosial ekonomi, tradisi masyarakat, keterbukaan berkomunikasi dan keuntungan relatif, merupakan variabel independen karena diduga dapat mempengaruhi keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap kelanjutan program penghijauan lahan kritis sebagai variabel dependen. Hubungan variabel ini secara grafis adalah sebagai berikut :

GAMBAR NO.1
HUBUNGAN ANTAR VARIABEL



Berdasarkan dugaan tersebut maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah perbedaan antara status sosial ekonomi mempengaruhi keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap program penghijauan lahan kritis ?
2. Apakah perbedaan tradisi keluarga mempengaruhi

keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap program penghijauan lahan kritis ?

3. Apakah perbedaan keterbukaan berkomunikasi mempengaruhi keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap program penghijauan lahan kritis ?
4. Apakah perbedaan keuntungan relatif mempengaruhi keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap program penghijauan lahan kritis ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang :

1. Keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap program penghijauan lahan kritis antara warga masyarakat yang berstatus sosial ekonomi tinggi dan berstatus sosial ekonomi rendah.
2. Keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap program penghijauan lahan kritis antara warga masyarakat yang masih kuat memegang tradisi keluarga dan yang sudah lemah memegang tradisi

keluarga.

3. Keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap program penghijauan lahan kritis antara warga masyarakat yang terbuka terhadap informasi dari luar dan warga masyarakat yang tidak terbuka terhadap informasi dari luar.
4. Keputusan warga masyarakat pada tahap konfirmasi terhadap program penghijauan lahan kritis antara warga masyarakat yang memperoleh keuntungan relatif tinggi dengan warga masyarakat yang memperoleh keuntungan relatif rendah dari hasil pengolahan lahan kritisnya.

E. Kegunaan Penelitian

Pentingnya masalah 'Keputusan Warga Masyarakat Pada Tahap Konfirmasi Dalam Program Penghijauan Lahan Kritis' sebagai suatu topik penelitian dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

Pertama, secara teoritis hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi Pendidikan Luar Sekolah dalam hal pengayaan teori yang telah teruji, untuk kemudian dapat dijadikan pedoman/pegangan di dalam melaksanakan program-program Pendidikan Luar Sekolah di

masyarakat. Sebaliknya, konsep-konsep Pendidikan Luar Sekolah dapat memberikan pandangan-pandangan tentang upaya yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan program-program kegiatannya. Misalnya dalam penelitian ini dapat menunjang keberhasilan pembinaan program penghijauan di kampung Garung, desa Cilengkrang, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung.

Kedua, secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah yang dapat dijadikan masukan untuk merencanakan pengembangan program penghijauan serta menafsirkan kebutuhan belajar warga belajar yang menjadi sasaran pembinaan program penghijauan dalam rangka perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih positif. Dengan diungkapkannya berbagai faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku warga masyarakat setelah beberapa waktu sebelumnya mengadopsi program penghijauan, diharapkan dapat dikembangkan suatu pola pembinaan untuk meningkatkan kemampuan memahami dan memanfaatkan lingkungan secara lebih bijaksana bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri.